

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI  
EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KINERJA PADA  
DINAS PERDAGANGAN KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ADE AYUNDA APRILIA  
NPM : 17.833.0131**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/22

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI  
EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KINERJA PADA  
DINAS PERDAGANGAN KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area



**OLEH :**

**ADE AYUNDA APRILIA  
NPM : 17.833.0131**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/12/22

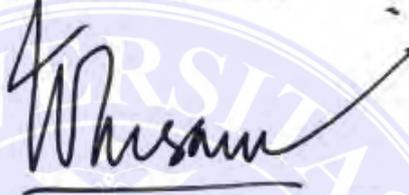
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/22

## LEMBARAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektifitas Dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perdagangan Kota Medan  
Nama : ADE AYUNDA APRILIA  
NPM : 17.833.0131  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi

Disetujui Oleh :  
Komisi Pembimbing



Warsani Purnama Sari, SE, Ak, MM

Pembimbing

Mengetahui :



Ahmad Rafiq, BBA(Hons), MMgt., Ph.D., CIMA  
Dekan



Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak  
Ketua Prodi Akuntansi

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus : 21 September 2022

## HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian - bagian tertentu dalam penulisan sripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 September 2022



Ade Ayunda Aprilia  
NPM. 17.833.0131

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Ayunda Aprilia  
NPM : 17.833.0131  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektifitas Dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perdagangan Kota Medan beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 21 September 2022  
Yang Membuat Pernyataan,



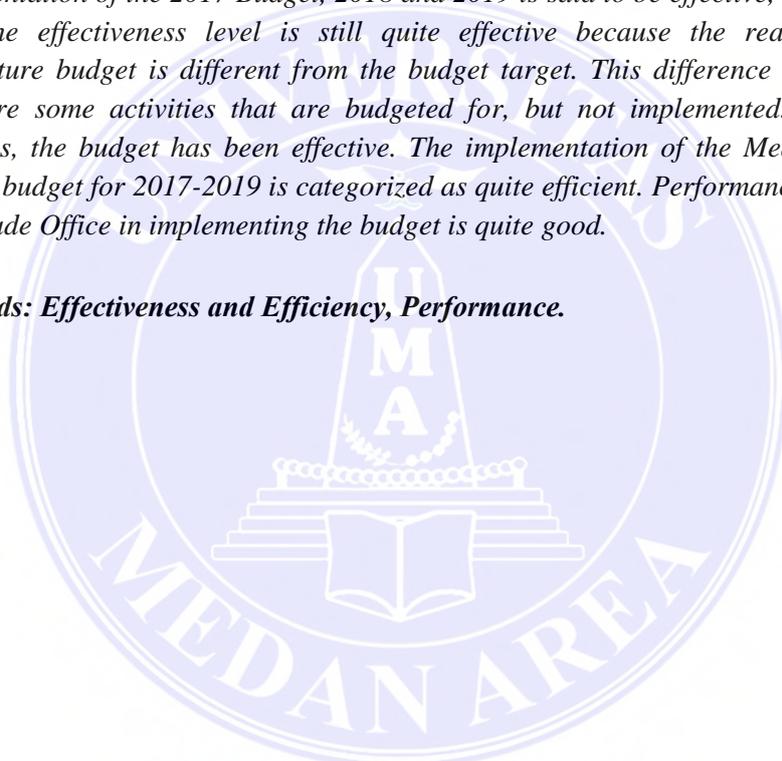
**Ade Ayunda Aprilia**  
NPM. 17.833.0131

## ABSTRACT

*This research was conducted to determine the performance of the Medan City Trade Office. in realizing the budget has been running effectively and efficiently. The type of research used is a type of qualitative research. Based on the characteristics of the problem raised by the researcher, this research is classified as a quantitative descriptive study. The data used in this study are primary data and secondary data obtained directly from the company such as interview data and data in the form of budget information. While secondary data obtained from books, journals, internet or other media that support this research.*

*From the results of data analysis, the results showed that the level and criteria for the effectiveness of the budget for the Medan City Trade Office. 2017- 2019 is very varied. The highest level of effectiveness was in 2018 and the lowest was in 2019. The implementation of the 2017 Budget, 2018 and 2019 is said to be effective, but in 2018 and 2019 the effectiveness level is still quite effective because the realization of the expenditure budget is different from the budget target. This difference occurs because there are some activities that are budgeted for, but not implemented. But for other activities, the budget has been effective. The implementation of the Medan City Trade Office's budget for 2017-2019 is categorized as quite efficient. Performance at the Medan City Trade Office in implementing the budget is quite good.*

**Keywords:** *Effectiveness and Efficiency, Performance.*



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk pada Kantor menganalisis kinerja Dinas Perdagangan Kota Medan 2017-2019. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari untuk pada Kantor menganalisis kinerja Dinas Perdagangan Kota Medan periode tahun anggaran 2017-2019. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan menggunakan analisis rasio efektifitas dan efisiensi untuk menilai kinerja pemerintah untuk pada Kantor menganalisis kinerja Dinas Perdagangan Kota Medan.

Hasil penelitian menunjukkan kriteria efektivitas anggaran belanja Kantor Dinas Perdagangan Kota Medan. tahun 2017-2019 sangat bervariasi dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dengan memiliki hasil rata-rata di atas 90%, sedangkan perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan Belanja Kantor Dinas Perdagangan Kota Medan.dapat dikatakan masih efisien dengan menunjukkan hasil rata-rata 90%-100% dan 80%-90%. Meskipun demikian, kestabilan nilai efisiensi menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik dengan adanya kecenderungan pemborosan pada Belanja Daerah.

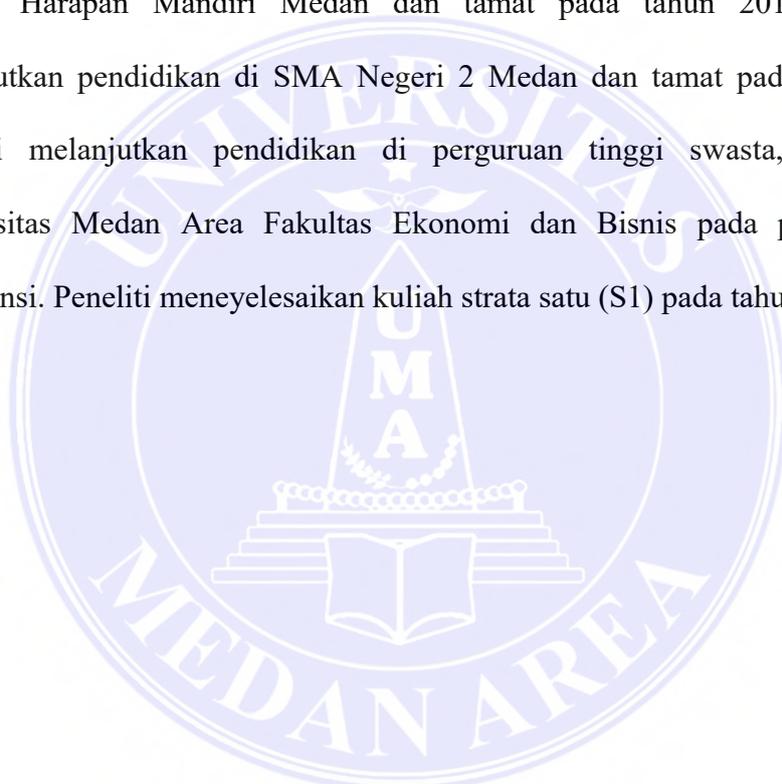
**Kata Kunci: Kinerja Kantor Perdagangan Kota Medan, Anggaran, Efektifitas, Efisiensi.**



## **RIWAYAT HIDUP**

Peneliti bernama Ade Ayunda Aprilia dilahirkan di Deli tua pada tanggal 30 April 1999 dari Bapak Aswarman Tanjung dan Ibu Fatma Zahara. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 060928 Medan pada tahun 2011. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Swasta Harapan Mandiri Medan dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Medan dan tamat pada tahun 2017. Peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta, tepatnya di Universitas Medan Area Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi Akuntansi. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2022.



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Skripsi ini menjadi salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Universitas Medan Area. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi ini yang berjudul **“Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perdagangan Kota Medan”**. Maka dari itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Emg, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Ahmad Rafiki, BBA (Hons) MMgt, Ph.D, CIMA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area.
4. Teristimewa Orang tua saya, Ayahanda Aswarman yang saya cintai dan Ibunda Fatma Zahara yang paling saya sayangi, yang telah memberikan banyak doa, dukungan, kasih sayang dan juga perhatiannya dalam menyelesaikan skripsi saya ini dengan baik, serta Suami saya Ahmad Damzi Harahap yg tercinta, dan adik saya Gilang Azhari Yanda yang sudah mendukung dan mendoakan saya untuk kesuksesan saya kelak.
5. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, Ak, MM. Selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberi saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ilham Ramadhan, SE, Ak, M.Si, CA. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Muhammad Habibie, SE, M.Ak. Selaku Dosen Sekretaris yang telah memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen – dosen dan para staf akademik dan petugas lainnya di Universitas Medan Area.
9. Mama dan Papa mertua yang saya sayangi, dan adik-adik ipar saya yang sudah memberikan dukungan, semangat, serta mendoakan saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat - sahabat GIBAHGABUT tersayang Elsa Rahmi Nst, Vidia Chairunnisa, Rizki Yulia, M. Reza Advı, sahabat XYLITOL tersayang Inca, Inya, Inyi, Utek, Fatin, Sifa, dan Ici yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
11. Teman – teman baik seperjuangan stambuk 2017 khususnya Akuntansi A3 dan teman – teman lainnya yang tidak bisa penulis tulis satu per satu semuanya disini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

**Peneliti, Agustus 2022**

**Ade Ayunda Aprila**  
**NPM. 17.833.0131**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1 Anggaran.....	11
2.1.2 Anggaran Sektor Publik.....	16
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	20
2.1.4 Kinerja Pemerintah .....	25
2.1.5 Manfaat Analisis Realisasi Anggaran Sektor Publik .....	29
2.2 Review Penelitian Terdahulu .....	30
2.3 Kerangka Konseptual .....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	35
3.3 Definisi Operasional.....	36
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian .....	37
3.4.1 Populasi.....	37
3.4.2 Sampel .....	37
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	38

3.5.1 Jenis Data.....	38
3.5.2 Sumber Data.....	38
3.6 Metode Pengumpulan Data .....	38
3.7 Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Medan .....	42
4.2 Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Medan .....	44
4.3 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Medan.....	45
4.4 Hasil Penelitian dan Analisis Data .....	45
4.4.1 Anggaran.....	45
4.4.2 Realisasi .....	46
4.5 Analisis Data .....	49
4.5.1 Analisis Efektivitas .....	49
4.6 Pembahasan .....	54
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Rincian APBD Dinas Perdagangan Kota Medan.....	5
Tabel 1.2 <i>Research Gap</i> .....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 3.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian .....	35
Tabel 3.2 Operasional Variabel.....	35
Tabel 3.3 Kriteria Penggolongan Efektivitas .....	39
Tabel 3.4 Kriteria Penggolongan Efisiensi .....	40
Tabel 4.1 Anggaran Belanja Dinas Perdagangan Kota Medan Tahun 2017.....	45
Tabel 4.2 Anggaran Belanja Dinas Perdagangan Kota Medan Tahun 2018.....	46
Tabel 4.3 Anggaran Belanja Dinas Perdagangan Kota Medan Tahun 2019.....	47
Tabel 4.4 Pengembalian Sisa Anggaran Ke Negara Tahun 2017 .....	48
Tabel 4.5 Pengembalian Sisa Anggaran Ke Negara Tahun 2018 .....	49
Tabel 4.6 Pengembalian Sisa Anggaran Ke Negara Tahun 2019 .....	49
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja 2017-2019 .....	53

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Medan.....	44



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Output Hasil Penelitian.....	62
Lampiran 2 Surat Telah Selesai Penelitian .....	65



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dengan adanya era baru penerapan pengelolaan keuangan daerah, perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia berkembang pesat. Manajemen memerlukan rencana anggaran yang secara sistematis dapat menggambarkan perencanaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi, dan menjadi pedoman kerja. Anggaran publik berkaitan dengan proses penggunaan dana publik untuk menentukan jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap rencana dan kegiatan dalam satuan moneter. Anggaran adalah suatu rencana tertulis tentang kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dalam jangka waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan mata uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Selain itu, anggaran juga memiliki fungsi untuk mengidentifikasi segala bentuk penyimpangan yang terjadi, dan penting untuk meningkatkan tanggung jawab masing-masing pengelola keuangan. Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat kontrol. Anggaran sebagai alat perencanaan menunjukkan tujuan yang harus dicapai oleh publik, sedangkan anggaran sebagai alat kontrol menunjukkan alokasi dana publik yang disetujui untuk digunakan oleh legislatif. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja instansi/organisasi pemerintah, dapat diketahui apakah anggaran yang telah dirumuskan dapat digunakan sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan publik. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah, karena dapat menjadi daerah yang kuat, mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi lemah, tergantung

bagaimana mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah, karena dapat menjadi daerah yang kuat, mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi lemah, tergantung bagaimana mengelola keuangannya.

Anggaran sektor publik merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pemerintah daerah untuk menggali sumber pendanaan yang berasal dari potensi daerah serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber pendanaan yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan suatu bentuk informasi yang dapat dikomunikasikan secara relevan jika digunakan sistem yang benar, sangat bermanfaat bagi perusahaan terutama bagi para pengambil keputusan yang harus dapat menentukan segala sesuatu secara efektif untuk dapat bertahan. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan bagi instansi pemerintah yang menyediakan dana melalui APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah kelurahan, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Memberikan otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan sendiri anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah.

Di era otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus keluarganya sendiri. Tujuannya antara lain untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat dalam memantau dan mengontrol penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan antar daerah. mendorong inovasi. Patuhi izin ini. Diharapkan pemerintah daerah lebih mampu menggali sumber pendanaan khususnya melalui PAD untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan.

Masyarakat membutuhkan pemerintahan yang bersih atau pemerintahan yang dapat memberikan informasi yang bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan keuangannya. Anggaran yang dikelola oleh organisasi sektor publik harus menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas yang merupakan indikator kinerja keuangan entitas sektor publik. Pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dalam memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi, dan menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Bastian, 2016; 297).

Kinerja diukur melalui penggunaan pengukuran kinerja dimana suatu

matrik digunakan untuk mengkuantifikasi efisiensi atau efektivitas dari suatu kegiatan (Matthews, 2011).

Perencanaan anggaran yang lemah memungkinkan munculnya kekurangan biaya (*underfinancing*) atau kelebihan biaya (*overfinancing*) yang akan mempengaruhi anggaran dan pada tingkat efisiensi anggaran, terutama anggaran belanja di Dinas Perdagangan Kota Medan.

Fenomena yang terkait dengan penganggaran di Dinas Perdagangan Kota Medan masih mengkhawatirkan, terutama pengeluaran yang belum dapat mendukung prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabilitas (bertanggungjawab), transparan, *value of Money* (Efisien, Ekonomi, dan Efektif). Asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, adalah :

1. Efisien, merupakan pencapaian keluaran maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
2. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
3. Efektif, pencapaian dengan hasil target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
5. Bertanggungjawab, merupakan perwujudan dan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

6. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
7. Kepatuhan adalah sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional.

Pengelolaan keuangan yang tidak sesuai kebutuhan dan skala prioritas dan masih kurang mencerminkan aspek efisiensi dan efektifitas karena kualitas perencanaan anggaran relatif lemah. Perencanaan anggaran yang lemah juga diikuti oleh ketidakmampuan untuk meningkatkan penerimaan terus menerus. Sementara itu, pengeluaran terus meningkat sehingga mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas pada Dinas Perdagangan Kota Medan.

**Tabel 1.1**  
**Rincian APBD Dinas Perdagangan Kota Medan**

Tahun	Dinas Perdagangan		PDRB Medan	Defisit Anggaran	Perbandingan Defisit Anggaran dengan PDRB Medan
	Pendapatan	Belanja			
2019	350.000.000	34.865.306.378	156.780.580.000.000	34.515.306.378	0,0002%
2020	350.000.000	36.086.174.274	153.669.830.000.000	35.736.174.274	0,0023%

Sumber: [www.pemkomedan.go.id](http://www.pemkomedan.go.id) diakses pada 18 September 2021 dan [www.medankota.bps.go.id](http://www.medankota.bps.go.id) diakses pada 19 Oktober 2021.

Menurut data APBD yang dialokasikan oleh Dinas Perdagangan Kota Medan tahun 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk Pendapatan dan Rp. 34.865.306.378,- untuk Belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Medan masih belum mampu membuat anggaran yang sesuai, sehingga masih banyak rencana kerja yang lebih baik yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti. Namun terkait dengan hal tersebut, Dinas Perdagangan di Kota Medan masih belum efektif dan efisien dalam pencapaian anggarannya.

Pada tabel 1.1 menunjukkan perbandingan jumlah pendapatan dan belanja Dinas Perdagangan Kota Medan dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Dari table

diatas disimpulkan bahwa nilai belanja lebih mendominasi dibandingkan nilai pendapatan. Nilai belanja yang tinggi dapat diartikan bahwa kurang efektifnya anggaran. Hal ini menyebabkan Dinas Perdagangan Kota Medan mengalami Defisit. Defisit Anggaran dan dibandingkan dengan PDRB mencapai 0,0002% (2019) dan 0,0023% (2020), kedua angka ini masih berada di bawah batas maksimal kumulatif defisit menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 125/PMK.07/2019 yaitu 0,28%. Maka dari itu saya tertarik meneliti topik ini, walaupun masih terjadi dominasi belanja daripada anggaran, nilai defisit anggaran dibandingkan dengan PDRB masih berada di bawah batas maksimal, membuat saya tertarik bagaimana tingkat efektif dan efisiensinya kinerja pada Dinas Perdagangan Kota Medan.

Kebijakan anggaran merupakan referensi umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya, sedangkan arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan anggaran secara efisien dan efektif. Pengelolaan anggaran harus dapat dilakukan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan dan manfaat.

Oleh karena itu, dalam rangka pertanggungjawaban publik, maka Dinas Perdagangan Kota Medan wajib melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

Efisiensi dan Efektivitas dapat melihat sejauh mana suatu keadaan keuangan mempergunakan atau memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada

secara ekonomis, hemat (efisien) dan dilakukan secara tepat dan memenuhi sasaran (efektif) serta hasil yang dicapai tersebut memiliki rasionalitas terhadap penggunaan sumber-sumber yang ada (produktivitas). Efisiensi (Daya Guna) merupakan perbandingan antara output dengan input (Endah : 2015). Organisasi sektor publik akan dinilai baik jika yang bersangkutan mampu dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dan biaya yang rendah. Tuntutan baru untuk organisasi sektor publik yaitu selalu memperhatikan *value for money*. Karena tujuan yang dikehendaki masyarakat selalu mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu dalam pengadaan dan alokasi sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasil dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing cost*), serta (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (Sumenge : 2013).

Efisiensi dan efektivitas sangat penting dalam mengukur atau membandingkan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan *input* yang digunakan, serta hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Evaluasi efektivitas dan efisiensi pelayanan transportasi di Kota Medan lebih difokuskan pada evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilakukan pada setiap tahun anggaran. Evaluasi kinerja melalui LAKIP hanya mengandalkan *output* yang diperoleh Dinas Perdagangan Kota Medan dengan membandingkan rencana yang ingin dicapai tanpa mempertimbangkan hasil. Oleh karena itu, LAKIP merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab instansi pemerintah tentang apa yang telah mereka capai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan tugas yang

diterima oleh badan publik tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan Muchran dkk. (2021) menunjukkan bahwa analisis realisasi anggaran efektifitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan dikatakan baik. Hasil penelitian yang dilakukan Shofwah (2019) menunjukkan bahwa Hasil penelitian untuk tingkat efektifitas pada tahun 2016-2018 seluruhnya dalam kategori efektif karena hasil pencapaian tingkat efektifitas lebih dari 90%, hal ini dapat dikatakan baik dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Hasil penelitian untuk tingkat efisiensi pada tahun 2016-2018 seluruhnya dalam kategori kurang efisien, hal ini terjadi karena penggunaan anggaran belanja langsung lebih besar dari penggunaan realisasi total anggaran belanja. Hasil penelitian yang dilakukan Dien dkk. (2015) menunjukkan bahwa Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat dan kriteria efektifitas penerimaan PAD di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 sangat efektif, namun tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja secara keseluruhan kurang efisien dikarenakan penggunaan anggaran belanja yang terlalu tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan Waney dkk. (2019) pada tahun 2012 sampai tahun 2016 tingkat efektifitas sudah masuk dalam kriteria efektif dan Pengelolaan anggaran belanja ini sudah berhasil memenuhi syarat efisiensi. Hasil penelitian yang dilakukan Pebriani (2019) dari tahun ke tahun kurangnya tingkat efektifitas dan efisiensi antara anggaran dan realisasinya.

Untuk mempermudah pembaca dalam melihat kesenjangan hasil penelitian tersebut, peneliti menyajikan *research gap* dalam tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Research Gap**

Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil	Penelitian Sebelumnya
Realisasi Anggaran	Efektivitas	Efektif	Muchran dkk (2021)
		Efektif	Shofwah (2019)
		Efektif	Dien dkk (2015)
		Efektif	Waney dkk (2019)
		Kurang Efektif	Pebriani (2019)
	Efisiensi	Efisien	Muchran dkk (2021)
		Kurang Efisien	Shofwah (2019)
		Kurang Efisien	Dien dkk (2015)
		Efisien	Waney dkk (2019)
		Kurang Efisien	Pebriani (2019)

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya terutama penelitian yang dilakukan Muchran dkk (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

1. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Dinas Perdagangan Kota Medan sedangkan Muchran dkk (2021) mengambil studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Pada Dinas Perdagangan Kota Medan”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah dari penelitian ini adalah **“Apakah kinerja pada Dinas Perdagangan Kota Medan dalam merealisasikan anggaran sudah berjalan efektif dan efisien?”**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, untuk menjawab masalah yang

terkait dengan pertanyaan penelitian (*Research Question*) **“Untuk mengetahui apakah kinerja pada Dinas Perdagangan Kota Medan dalam merealisasikan anggaran sudah berjalan efektif dan efisien”**.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan anggaran.

2. Bagi Dinas Perdagangan Kota Medan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam hal mempertahankan serta memperbaiki pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien dimasa yang akan datang.

3. Bagi akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah untuk ilmu pengetahuan, memperluas wawasan mengenai pelaksanaan efektivitas dan efisiensi anggaran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Defenisi Anggaran**

Menurut Munandar (2016:3) adalah “suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.” Anggaran merupakan alat untuk merencanakan dan mengendalikan keuangan perusahaan dalam penyusunannya dilakukan secara periodik

Pengertian lain dari anggaran menurut Nafarin (2017:11) menyatakan bahwa “Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan.” Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Sedangkan menurut Garrison dan Noreen (2017:402) mendefenisikan anggaran sebagai berikut : “Anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu”.

Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran di

perusahaan swasta yang muatan politiknya relatif lebih kecil. Bagi organisasi sektor publik seperti akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

Penyusunan anggaran berurusan dengan masa depan. Tujuan penyusunan anggaran bagi perusahaan adalah memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan di masa mendatang. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan.

Berikut adalah tujuan-tujuan lainnya yang terkait dengan penyusunan anggaran menurut Sasongko dan Parulian (2013:3) :

1. Perencanaan Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.
2. Koordinasi Anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian-bagian di dalam perusahaan.
3. Motivasi Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.
4. Pengendalian Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan.

Menurut Nafarin (2013:19), anggaran mempunyai banyak manfaat antara lain:

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.
2. Dapat dipergunakan sebagai alat meniai kelebihan dan kekurangan pegawai.

3. Dapat memotivasi pegawai.
4. Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai.
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
6. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

Menurut Nafarin (2013:20), Anggaran di samping mempunyai banyak manfaat, namun juga mempunyai beberapa kelemahan yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian.
2. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap (komprehensif) dan akurat.
3. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif.

Anggaran yang harus disusun suatu perusahaan terdiri dari berbagai jenis anggaran. Semua aktivitas yang direncanakan suatu perusahaan di dalam periode mendatang harus di susun didalam suatu anggaran lengkap. Karena tanpa memiliki anggaran lengkap, maka aktivitas yang akan dilaksanakan tetapi tidak memiliki anggaran tersebut tetap diupayakan untuk dilaksanakan, maka aktivitas tersebut tidak dapat dinilai hasilnya.

Rudianto (2009:7) mengemukakan bahwa walaupun anggaran yang harus disusun perusahaan terdiri dari berbagai jenis anggaran, tetapi pada dasarnya anggaran perusahaan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok anggaran,

yaitu:

#### A. Anggaran Operasional

Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. karena itu, anggaran operasional mencakup:

1. Anggaran Pendapatan merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Anggaran pendapatan dapat disusun berdasarkan jenis produk, wilayah pemasaran, kelompok konsumen atau kelompok wiraniaga. Di dalam kelompok anggaran ini biasanya terkandung pula ramalan tentang beberapa kondisi tertentu yang berada di luar kendali manajemen penjualan, misalnya keadaan ekonomi nasional dan dunia, perubahan harga jual pesaing, dsb, sehingga manajer pemasaran tidak dapat dituntut untuk sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran yang dianggarkan. Anggaran penjualan dirancang untuk mengukur efektivitas pemasaran.
2. Anggaran Biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Anggaran biaya biasanya disusun berdasarkan jenis biaya yang dikeluarkan. Di dalam kelompok anggran ini, dibedakan menjadi anggaran biaya terukur dan anggran biaya diskresioner. Anggaran biaya terukur dirancang untuk mengukur efisiensi dan manajer operasional memikul taggung jawab penuh atas tercapainya sasaran yang dianggarkan. Sedangkan anggaran biaya diskresioner tidak dirancang untuk mengukur efisiensi dan penyusunan anggran bertanggung jawab untuk membelanjakan jumlah

yang telah ditetapkan.

3. Anggaran Laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu dimasa mendatang. Anggaran laba sebenarnya merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya.

#### B. Anggaran Keuangan

Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan secara langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk. Anggaran ini merupakan pendukung upaya perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran keuangan mencakup beberapa jenis anggaran, yaitu:

1. Anggaran Investasi adalah rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang, seperti pembelian dan pembangunan gedung kantor, bangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian tanah, dan sebagainya.
2. Anggaran kas adalah rencana aktivitas penerimaan kas dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut.
3. Proyeksi neraca adalah keuangan yang diinginkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Berati, dalam proyeksi neraca tersebut mencakup jumlah harta ingin dimiliki perusahaan beserta kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan di masa

mendatang.

Dilihat dari kelengkapan anggaran yang disusun oleh suatu organisasi, maka anggaran dapat dikategorikan sebagai anggaran parsial dan anggaran komprehensif:

1. Anggaran Parsial adalah anggaran yang terdiri dari satu jenis atau kelompok kegiatan tertentu saja, misalnya anggaran penjualan saja, anggaran biaya pemasaran saja, anggaran administrasi saja, dan sebagainya.
2. Anggaran Komprehensif adalah keseluruhan anggaran yang terdiri dari gabungan anggaran-anggaran parsial di dalam suatu periode waktu tertentu. Pada dasarnya anggaran komprehensif merupakan gabungan dari anggaran pendapatan, anggaran biaya dan anggaran laba. Anggaran komprehensif menggambarkan keseluruhan rencana yang ingin dicapai perusahaan di dalam kurun waktu tertentu.

### **2.1.2 Anggaran Sektor Publik**

Anggaran sektor publik merupakan rencana keuangan dari proyeksi pengeluaran dan penerimaan di masa yang akan datang dengan memperhatikan data masa lalu sebagai acuan penyusunan anggaran. Dalam organisasi sektor publik, Penganggaran adalah proses politik. Karena di sektor publik anggaran harus dikomunikasikan kepada publik agar dapat dikritisi, didiskusikan dan dibantu dalam pembentukannya. Menggunakan anggaran di sektor publik sebagai panduan untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya, baik keuangan maupun lainnya.

Sektor publik memegang peranan yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Kegagalan di sektor publik dapat berdampak pada terganggunya

sektor ekonomi dan sosial yang dapat menciptakan keadaan krisis dalam suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sektor publik harus dilakukan secara terus menerus.

Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi suatu informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. (Mardiasmo 2009) Sehingga, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

1. Berapa biaya-biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja), dan
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Aliran uang yang terkait dengan aktivitas pemerintahan akan mempengaruhi harga kebutuhan dan pelayanan masyarakat, lapangan kerja, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan beban pajak yang harus dibayar atas pelayanan yang diberikan pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2009) Keputusan anggaran yang dibuat pemerintah daerah dan provinsi seharusnya dapat merefleksikan pemerintah daerah atau provinsi dengan baik. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang.
- b. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup

masyarakat.

- c. Anggaran diperlukan meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

Menurut Maridiasmo (2009) Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan, Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut.
- b. Anggaran sebagai alat pengendalian, Anggaran sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran / belanja pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran.
- c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- d. Anggaran sebagai alat politik, Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.
- e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran

publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

f. Anggaran adalah alat penilaian kinerja, Kinerja akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian.

g. Anggaran sebagai alat motivasi, Anggaran sebagai instrumen untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achievable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, dan DPR/ DPRD. Masyarakat, Perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, dan sebagainya.

Jenis anggaran sektor publik ada 2 yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan. Menurut Undang-

undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 8 tentang Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Secara garis besar APBD terdiri dari 5 (lima) komponen utama, yaitu:

1. Pendapatan Daerah dan Hibah
2. Belanja Daerah
3. Keseimbangan primer
4. *Surplus/defisit* sisa lebih pembiayaan anggaran pada tahun sebelumnya (SiLPA)
5. Pembiayaan

Sedangkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan Anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik-swasta.

### **2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Mardiasmo (2009:63) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana yang diungkapkan dalam bentuk kuantitatif yang biasanya berhubungan dengan keuangan. Menurut UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana penerimaan dan pengeluaran daerah yang meliputi rencana pendapatan, belanja, bagi hasil, cadangan, dan pembiayaan yang disetujui oleh DPRD dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD merupakan rencana kerja kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka

dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran (HaIm,2012:10). APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan, pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus, kemudian pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi, di antaranya :

- a. Fungsi otorisasi yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas

perekonomian.

- e. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pemerintah daerah menyiapkan anggaran setiap tahun. Penyusunan anggaran adalah panduan untuk pengeluaran dan pendapatan daerah untuk memberikan keseimbangan yang dinamis dalam melaksanakan kegiatan di daerah dengan tujuan untuk mencapainya peningkatan produksi, meningkatkan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, sumber pendapatan maupun juga penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang dimaksud terbagi menjadi empat kelompok pendapatan, di antaranya:

- a. Pajak Daerah terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan parkir.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah. Dipisahkan menjadi tiga bagian, yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD,

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN, dan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta.

- d. PAD lainnya yang sah berasal dari lain-lain milik Pemda. Misalnya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, dan lainnya.

Kemandirian APBD berkaitan erat dengan kemandirian PAD. Hal ini karena semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Di mana kepentingan masyarakat tanpa muatan kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

## 2. Dana bagi hasil

Menurut PP No 55 Tahun 2005 Pasal 19 Ayat 1, dana bagi hasil (DBH) terdiri atas pajak dan sumber daya alam. DBH pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan. Sedangkan DBH sumber daya alam meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas, dan pertambangan panas bumi. Besaran DBH sebagai berikut:

- a. Besaran dana bagi hasil penerimaan negara dari PBB dengan imbalan 10 persen untuk daerah.
- b. Besaran dana bagi hasil penerimaan negara dari BPHTB dengan imbalan 20 persen untuk pemerintah dan 80 persen untuk daerah.
- c. Besaran dana bagi hasil pajak penghasilan dibagikan kepada daerah sebesar 20 persen.
- d. Dana bagi hasil dari sumber daya alam ditetapkan masing-masing

seusai peraturan perundang-undangan.

- e. Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN, dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- f. Cara menghitung DAU sesuai ketentuannya sebagai berikut: DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- g. DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan 90 persen dari dana alokasi umum.
- h. DAU untuk suatu daerah kabupaten atau kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten atau kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten atau kota.
- i. Porsi daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.
- j. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.

#### 1. Dana alokasi khusus

Menurut UU No 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu.

Tujuan DAK untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus tersebut adalah:

- a) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan alokasi umum.
- b) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

#### **2.1.4 Kinerja Pemerintah**

Kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006). Menurut Nordiawan (2010) kinerja pemerintah tidak bisa dilihat hanya dari sisi input dan output tetapi juga dari sisi outcome, manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut EKPPD. EKPPD merupakan penilaian kinerja berdasarkan LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), informasi keuangan daerah dan laporan-laporan lainnya yang dibuat oleh pemerintah sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan (Permendagri Nomor 73 Tahun 2009).

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja juga digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam perumusan strategi planning suatu perusahaan atau pemerintah.

Sistem Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang

bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system.

Menurut (Mahmudi, 2015) menyatakan bahwa Indikator Kinerja yang dikembangkan hendaknya memiliki karakteristik seperti yang dijelaskan antara lain:

1. Sederhana dan mudah dipahami, yang menjadi indikator kinerja hendaknya sederhana hal ini dapat menyebabkan yang mengukur dan memberikan penilaian tidak terlalu bingung.
2. Dapat diukur, indikator kinerja hendaknya dapat diukur bukan sesuatu yang abstrak.
3. Dapat dikuantifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio, persentase dan angka.
4. Dikaitkan dengan standar atau target kinerja, hal ini sudah jelas bahwa indikator memang dikaitkan dengan target kinerja yang mana nantinya kan lebih mudah dalam pelaksanaannya.
5. Berfokus pada customer service, kualitas, dan efisiensi.
6. Dikaji secara teratur, jika indikator tidak dikaji secara teratur tentu saja nantinya akan menjadi sia-sia tidak ada follow up nya.

Informasi mengenai kinerja sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Indikator kinerja tersebut diorientasikan sebagai pedoman bukan sebagai alat pengendalian. Indikator kinerja memiliki peran penting sebagai proses pembentukan organisasi pembelajar (learning organization). Jika organisasi

terus-menerus belajar bagaimana memperbaiki kinerja, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai target, maka indikator kinerja akan bersifat mendorong dan memotivasi dalam cara yang positif.

### 2.1.3.1 Efektivitas

Efektivitas menurut Mardiasmo (2009:131) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas kinerja anggaran sektor publik adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah di terapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (cost of outcome). Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Makmur (2011:17-19) mengungkapkan Indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas kinerja pemerintah, sebagai berikut :

- a. Ketepatan waktu.
- b. Ketepatan perhitungan biaya.
- c. Ketepatan dalam pengukuran.
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan.
- e. Ketepatan berpikir.

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dan keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program.

Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan

atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pengukuran efektivitas bisa dilakukan hanya dengan mengukur *outcome*

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan target dengan anggaran penerimaan dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

#### 2.1.4.1 Efisiensi

Efisiensi menurut Mardismo (2009:135) adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan perhitungan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah dilihat dari sisi pengeluaran formula perhitungannya antara penerimaan daerah dengan belanja rutin. Suatu kerja organisasi atau pemerintah dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktifitas, performance, dibanding masukan-masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan. Dengan kata lain, meminimumkan biaya penggunaan sumberdaya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan, atau sebaliknya disebut efisien apabila dapat memaksimalkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas. Efisiensi penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya (input) minimal diperoleh hasil (output) yang diinginkan. Indikator penentu

efisiensi kinerja pemerintah daerah adalah :

- a. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
- c. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- d. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
- e. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Efisiensi kinerja anggaran sektor publik diukur dengan rasio antara output dan input. Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Efisiensi kinerja anggaran sektor publik lebih bersifat relative.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

### 2.1.5 Manfaat Analisis Realisasi Anggaran Sektor Publik

1. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya.

2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi : telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, dan telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan ekonomi.

## 2.2 Review Penelitian Terdahulu

Review dari beberapa penelitian terdahulu akan dijadikan bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dien dkk (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 sangat efektif, namun tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja secara keseluruhan kurang efisien dikarenakan penggunaan anggaran belanja yang terlalu tinggi. Diharapkan pimpinan Dinas Pendapatan Kota Bitung lebih mengoptimalkan semua sumber daya

yang ada untuk memperbaiki pengelolaan dalam penggunaan anggaran belanja agar lebih ditingkatkan efisiensinya.

2. Waney dkk (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, Hasil penelitian diperoleh bahwa Pada tahun 2012 tingkat efektivitas dari anggaran belanja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara berada dalam kriteria yang cukup efektif. Walau masuk dalam kriteria yang cukup efektif, realisasi anggaran yang dicapai masih cukup jauh perbedaannya untuk memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Dan pada tahun 2013 sampai tahun 2016 tingkat efektivitas sudah masuk dalam kriteria efektif, tetapi masih seperti tahun sebelumnya realisasi anggaran yang dicapai masih cukup berbeda dengan target anggaran. a pada tahun 2012 tingkat efisiensi 40,19%, tahun 2013 tingkat efisiensi 56,53%, dan tahun 2014 tingkat efisiensi 45,51%, tahun 2015 tingkat efisiensi 40,78% dan tahun 2016 tingkat efisiensi 57,70%. Efektif dan efisien.
3. Pebriani (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Realisasi Anggaran Dalam Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kppn) Singaraja Tahun 2016-2018, Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kinerja KPPN Singaraja dalam hal efektivitas dan efisisiensi Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal ini nampak dalam analisis perbandingan dari tahun 2016-2017. Di lihat dari tahun ke tahun kurangnya tingkat efektivitas dan

efisiensi antara anggaran dan realisasinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pada pendapatan serta belanja yang di keluarkan.

4. Shofwah (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Instansi Pemerintah, Hasil penelitian untuk tingkat efisiensi pada tahun 2016-2018 seluruhnya dalam kategori kurang efisien, hal ini terjadi karena penggunaan anggaran belanja langsung lebih besar dari penggunaan realisasi total anggaran belanja.
5. Muchran dkk (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis realisasi anggaran efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan dikatakan baik.

Berikut penelitian terdahulu sebagai referensi penulis dapat dilihat pada tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dien dkk (2015)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung	Memiliki variabel penelitian yang sama, objek penelitian berada di Dinas Pemerintahan Kota.	Objek penelitian berada di dinas yang berbeda dan kota berbeda pula
2	Waney dkk (2019)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	Memiliki variabel penelitian yang sama, objek penelitian berada di Dinas Pemerintahan.	Objek penelitian berada di dinas dan provinsi yang berbeda
3	Pebriani (2019)	Analisis Realisasi Anggaran Dalam Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Kantor	Memiliki variabel penelitian yang sama dan waktu penelitian memakai	Rentang waktu penelitian yang berbeda, tempat penelitian juga

		Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kppn) Singaraja Tahun 2016-2018	periode 2018.	berbeda
4	Shofwah (2019)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Instansi Pemerintah	Memiliki variabel penelitian yang sama	Objek penelitian berbeda
5	Muchran dkk (2021)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan	Memiliki variabel penelitian yang sama	Objek penelitian berada di dinas dan kota yang berbeda

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan bagaimana keterkaitan teori-teori yang berhubungan dengan variabel yang akan diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kerangka konseptual dibangun untuk memperlihatkan hubungan atau pengaruh setiap variabel dalam satu penelitian sehingga menimbulkan suatu hipotesis. Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti membuat kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiono (2008), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau (lebih independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Penelitian deskriptif ini adalah salah satu jenis penelitian kuantitatif non eksperimen yang tergolong mudah. Penelitian ini menggambarkan data kuantitatif yang diperoleh menyangkut keadaan subjek atau fenomena dari sebuah populasinya. Objek penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Perdagangan Kota Medan.

#### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perdagangan Kota Medan Jalan Jend. A. Haris Nasution No. 17 Medan 20143 Indonesia Telp. (061) 7852319. Waktu Penelitian ini adalah September 2021 sampai dengan selesai.

**Tabel 3.1**  
**Pelaksanaan Waktu Penelitian**

No	Keterangan	Tahun/Bulan															
		Januari/Pebruari 2022				Maret/April 2022				Mei/Juni 2022				Agustus/September 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset																
2	Pengajuan Judul																
3	Pembuatan Proposal																
4	Bimbingan Proposal																
5	Seminar Proposal																
6	Pengumpulan Data																
9	Seminar Hasil																
10	Meja Hiaju																

### 3.3 Definisi Operasional

Menurut Erlina (2011) definisi operasional adalah menjelaskan karakteristik dari obyek ke dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan ke dalam penelitian.

**Tabel 3.2**  
**Operasional Variabel**

No.	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator Variabel
1.	Analisis efektivitas (X1)	<b>Efektivitas adalah keberhasilan mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya . Efektivitas hanya berbicara masalah output saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut</b>	$RE = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$ <p>Sumber Munawir 2017</p>

		<b>berjalan</b> dengan efektif. Atau dengan kata lain Efektivitas adalah kesuksesan atau kegagalan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. <b>(sondang P Siagian)</b>	
3.	Analisis Efisiensi (Y)	<b>Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input yang terendah. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input yang dihasilkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Dwi Revita Sari 2021)</b>	$RE = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$ <p>(Dwi Revita Sari 2021)</p>

### 3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

#### 3.4.1 Populasi

Erlina (2011:75) populasi adalah sekelompok orang, kejadian, suatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) Dinas Perdagangan Kota Medan periode 2017 – 2019.

#### 3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2008). Mengingat populasi dari penelitian ini sangat luas, maka penulis mengambil sampel yaitu laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP) Dinas Perdagangan Kota Medan tahun 2017, 2018, dan 2019.

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

#### 3.5.1 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2008:244) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam angka dan dapat diukur ukurannya.

#### 3.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti untuk kepentingan penelitiannya. Menurut Sugiyono (2008:244) data tersebut merupakan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kota Medan.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2008:90) Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik antara lain :

1. Pengamatan (*observation*), yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian.
2. Dokumentasi studi dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Analisis data menurut Sugiyono (2008:244) adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis, menafsirkan, dan mengolah data pada Dinas Perdagangan Kota Medan, sehingga dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu analisis realisasi anggaran untuk menilai efektifitas dan efisiensi kinerja. Analisis ini terdiri dari beberapa langkah yaitu:

1. Menentukan Efektivitas

Pengukuran Efektivitas untuk mengetahui pengelolaan anggaran beberapa tahun. Efektivitas sebagai gambaran kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real pemerintah. Tingkat efektivitas digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Dalam menganalisis tingkat dari system pengelolaan keuangan daerah Dinas Perdagangan Kota Medan maka di perlukan data realisasi anggaran belanja langsung dan total anggaran belanja langsung. Dimana semakin besar presentase yang di capai maka semakin besar tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
- b. Dengan mengetahui perbandingan hasil target penerimaan dan realisasi anggaran belanja langsung, maka tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Dinas Perdagangan Kota Medan di berikan penilaian berdasarkan

Kepmendagri nomor 690.900.327 tahun 1996. Tentang pedoman penilaian kinerja keuangan perhitungan efektif semakin efektifitas mendekati angka 100% maka akan semakin efektif. Berikut kriteria efektifitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria efektifitas menurut Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 1996 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Kriteria Penggolongan Efektivitas**

Nilai Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No 690.900-327 Tahun 1996

## 2. Menentukan Efisiensi

Untuk menganalisis tingkat efesiensi pengelolaan keuangan daerah di lihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungan ratio antara realisasi anggaran belanja tidak langsung dengan total anggaran belanja tidak langsung, dimana semakin tinggi rasionya maka semakin efesien pengelolaan keuangan daerah tersebut. Adapun formula yang digunakan dalam perhitungan adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui perbandingan realisasi anggaran dengan anggaran belanja maka tingkat efesiensi pengelolaan keuangan daerah Dinas Perdagangan Kota Medan diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri nomor 690.900.327 tahun 1996. Tentang pedoman penilaian kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Kriteria Penggolongan Efisiensi**

Nilai Efektivitas	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No 690.900-327 Tahun 1996



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Kantor Dinas Perdagangan Kota Medan sudah maksimal dan kinerja Kantor Dinas Perdagangan Kota Medan sudah berhasil. Berdasarkan hasil perhitungan anggaran mengenai tingkat Efektivitas pelaksanaan belanja setiap tahunnya kriteria dikatakan sudah berjalan secara Efektif. Dikatakan efektif karena berdasarkan perhitungan tahun 2017 sebesar 99.19%, tahun 2018 sebesar 99.98% dan tahun 2019 sebesar 99.46%. Dilihat dari perhitungan tersebut kinerja Kantor Dinas Perdagangan Kota Medan sudah Efektif karena hasil yang dicapai 90% keatas. Untuk perhitungan Realisasi mengenai tingkat Efektivitas pelaksanaan belanja setiap tahunnya kriteria dikatakan sudah berjalan secara Efektif. Dikatakan efektif karena berdasarkan perhitungan tahun 2017 sebesar 92%. Dilihat dari perhitungan tersebut kinerja Kantor Dinas Perdagangan Kota Medan sudah Efektif karena hasil yang dicapai 90% ke atas. Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran mengenai tingkat Efisiensi pelaksanaan belanja setiap tahunnya kriteria dikatakan Kurang Efisien. Dikatakan kurang Efisien karena berdasarkan perhitungan tahun 2017 sebesar 91.12%, tahun 2018 sebesar 81.12% dan tahun 2019 sebesar 66.01%. Dilihat dari perhitungan tersebut kinerja Kantor Dinas Perdagangan Kota Medan Kurang Efisien karena hasil yang dicapai kurang dari 90%.

## 5.2 Saran

1. Kantor Dinas Perdagangan Kota Medan agar belanja yang dikeluarkan dapat lebih efektif dan efisien, maka hal penting yang harus diketahui oleh manajer publik adalah pemahaman tentang konsep belanja, dengan memahami konsep belanja maka perencanaan dan pengendalian pengeluaran daerah menjadi lebih mudah dilakukan. Agar dalam perencanaan sebisa mungkin merasionalkan belanja sehingga belanja yang dikeluarkan dapat lebih efektif dan efisien. Diharapkan pada Kantor tersebut untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawainya dalam pengelolaan Anggaran Belanja pada Kantor Dinas Perdagangan Kota Medan yang kurang dan cukup efisien agar memaksimalkan monitoring dan analisis Anggaran agar program kerja yang direncanakan tercapai sesuai target.
2. Peneliti selanjutnya Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2016). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Dien, A., Tinangon. J. & Walandouw. S. (2015) Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Universitas Sam Ratulangi. Jurnal EMBA. Vol. 3, No. 1. Manado
- Endah, V. & Cicilia, S. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Vol. 17, No. 2. Manado
- Erlina. (2011). Metodologi Penelitian. USU Pres. Medan
- Halim, Abdul dan Kusufi. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Salemba Empat : Jakarta.
- Klychova, G. S. (2014). Budgeting Efficiency for Cost Control Purposein Management Accounting System. Kazan State Universty Rusia. Rome
- Lubis, A. (2010). Akuntansi Keperilakuan. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi. (2015). Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta
- Makmur. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.
- Matthew, J. R. (2011). *Assesing Organizastional Effectiveness: The Role Of Performance Measures.. Library Quarterly* vol. 81 No. 1. The University of Chicago. Chicago
- Muchran, M., Winarsih, E. & Heldawati. (2021). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. AJAR, Vol. 04, No. 2. Makassar
- Munandar, (2010), Manajemen Keuangan Modern (Analisis, Perencanaan, dan Kebijakan), Bumi Aksara, Jakarta
- Nafarin, M. 2013. Penganggaran Perusahaan. Edisi ketiga, Cetakan kedua, Buku 1. Salemba Empat. Jakarta
- Nordiawan, D & Hertianti, A (2010). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta
- Pebriani, L. (2019) Analisis Realisasi Anggaran Dalam Menilai Efektivitas dan

Efisiensi Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja Tahun 2016-2018. Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal Riset Akuntansi. Vol. 8, No. 2. Singaraja

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 Tahun 1996. Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta

Pontoh, Winston. (2013). Akuntansi: Konsep dan Aplikasi. Halaman Moeka, Jakarta Barat.

Rudianto. 2009. Penganggaran: Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran. Erlangga. Jakarta

Sasongko dan Parulian. 2015. Anggaran. Salemba Empat. Jakarta

Shofwah, A. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Instansi Pemerintah. STIESIA Surabaya. Jurnal Umum dan Riset Akuntansi. Vol. 8, No. 7. Surabaya

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung

Sujarweni., V. W. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Baru Press. Yogyakarta

Sumenge, A. (2013). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. Universitas Sam Ratulangi. Jurnal EMBA. Vol 1, No 3. Manado

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan Negara. Jakarta

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta

Waney, C., Saerang. D. & Alexander. S. (2018) Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 13, No. 2. Manado

[www.disdag.pemkomedan.go.id](http://www.disdag.pemkomedan.go.id)

[www.pemkomedan.go.id](http://www.pemkomedan.go.id) (diakses pada 18 September 2021)

[ww.medankota.bps.go.id](http://ww.medankota.bps.go.id) (diakses pada 19 Oktober 2021)





**Lampiran 1 Output Hasil Penelitian****Anggaran Belanja Kantor Dinas Perdagangan Kota Medan  
Tahun 2017**

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Sisa (Rp)
1.	Gaji dan Tunjangan	3.245.847.665	3.037.562.255	93%	208.265.410
	<b>Sub total</b>	<b>3.245.847.665</b>	<b>3.037.562.255</b>	93%	208.265.410
2.	Belanja barang	491.620.000	487.675.874	99%	3.944.126
3.	Belanja modal	109.648.371.407	101.260.633.048	92%	8.387.738.359
	<b>Sub total</b>	<b>110.139.991.407</b>	<b>101.748.308.922</b>	<b>89%</b>	<b>8.391.682.485</b>
	<b>Total</b>	<b>113.385.839.072</b>	<b>104.785.871.177</b>	<b>92%</b>	<b>8.599.967.895</b>

**Anggaran Belanja Kantor Dinas Perdagangan Kota Medan  
Tahun 2018**

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Sisa (Rp)
1.	Gaji dan Tunjangan	2.963.717.800	2.803.825.961	94%	132.891.839
	<b>Sub total</b>	<b>2.963.717.800</b>	<b>2.803.825.961</b>	94%	<b>132.891.839</b>
2.	Belanja barang	426.499.500	426.403.006	99%	94.494
3.	Belanja modal	110.697.065.707	87.432.349.938	78%	23.264.715.769
	<b>Sub total</b>	<b>111.123.565.207</b>	<b>87.858.752.944</b>	<b>79%</b>	<b>23.264.810.263</b>
	<b>Total</b>	<b>114.087.283.007</b>	<b>90.662.578.905</b>	<b>79%</b>	<b>23.397.702.102</b>

### Anggaran Belanja Kantor Dinas Perdagangan Kota Medan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Sisa (Rp)
1.	Gaji dan Tunjangan	3.097.630.940	3.056.111.551	98%	41.519.389
<b>Sub total</b>		<b>3.097.630.940</b>	<b>3.056.111.551</b>	<b>98%</b>	<b>41.519.389</b>
2.	Belanja barang	424.750.000	422.490.192	99%	2.259.808
3.	Belanja modal	98.639.407.657	63.000.747.842	63%	35.638.659.817
<b>Sub total</b>		<b>99.064.157.657</b>	<b>63.423.238.034</b>	<b>64%</b>	<b>35.640.919.625</b>
<b>Total</b>		<b>102.161.788.597</b>	<b>66.479.349.585</b>	<b>65%</b>	<b>35.682.439.014</b>

#### Pengembalian sisa Anggaran ke Negara Tahun 2017

No	Belanja	Sisa	%
1	Gaji dan tunjangan	208.265.410	17%
2	Belanja barang	3.944.126	1%
3	Belanja modal	8.387.738.359	11%
<b>Total</b>		<b>8.599.947.895</b>	<b>18%</b>

#### Pengembalian sisa Anggaran ke Negara Tahun 2018

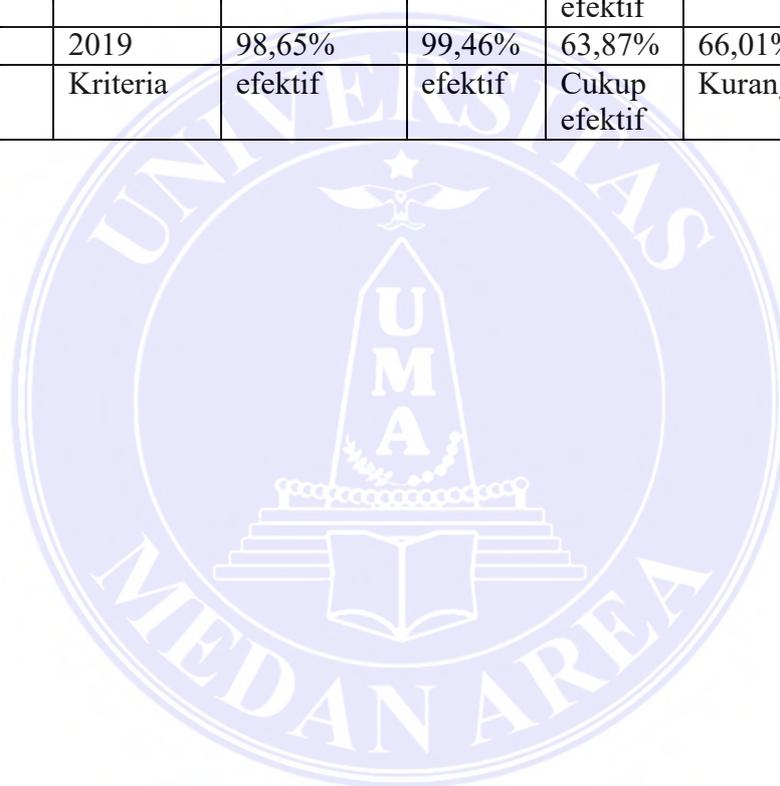
No	Belanja	Sisa	%
1	Gaji dan tunjangan	132.891.839	16%
2	Belanja barang	94.494	1%
3	Belanja modal	23.264.715.769	21%
<b>Total</b>		<b>23.397.702.102</b>	<b>21%</b>

#### Pengembalian sisa Anggaran ke Negara Tahun 2019

No	Belanja	Sisa	%
1	Gaji dan tunjangan	41.519.389	2%
2	Belanja barang	2.259.808	1%
3	Belanja modal	35.638.659.817	37%
<b>Total</b>		<b>35.682.439.014</b>	<b>35%</b>

### Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2017-2019

No	Tahun	Efektivitas			Efisiensi
		Gaji dan tunjangan	Belanja barang	Belanja modal	
1	2017	93,59%	99,19%	92,35%	91,12%
	Kriteria	efektif	efektif	efektif	Kurang Efisien
2	2018	94,60%	99,98%	78,98%	81,12%
	Kriteria	efektif	efektif	Cukup efektif	Kurang Efisien
3	2019	98,65%	99,46%	63,87%	66,01%
	Kriteria	efektif	efektif	Cukup efektif	Kurang Efisien



## Lampiran 2 Surat Telah Selesai Penelitian



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS PERDAGANGAN**  
Jalan Jendral Abdul Haris Nasution No. 17 Telp. (061) 7852326, 7852320  
M E D A N - 20143

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 893 / 437 . 5

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. DAMMIKROT, S.Sos, M.Si  
NIP : 19641127 198503 1 003  
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / (IV/c)  
Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA MEDAN

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Ade Ayunda Aprilia  
NPM : 178330131  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Penelitian : Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektifitas dan Efisiensi Kinerja pada Dinas Perdagangan Kota Medan.

Telah selesai melaksanakan penelitian / pengambilan data di Dinas Perdagangan Kota Medan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 01 Maret 2022  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA MEDAN

H. DAMMIKROT, S.Sos, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip. 19641127 198503 1 003